

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin maju ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan istilah UMKM diakui sebagai salah satu penyumbang dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan juga sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapat Lestari (2021) menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan struktural perekonomian nasional. Bentuk kontribusi UMKM yang dapat dirasakan sampai saat ini adalah meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional di era globalisasi ekonomi.

Mengingat pentingnya UMKM bagi masa depan perekonomian Nasional, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut keberadaan UMKM sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, agar mampu terdorong menjadi pelaku pada kegiatan UMKM melalui pemberian

fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa UMKM perdagangan dan reparasi menjadi salah satu pilihan yang menarik dalam dunia usaha saat ini. Fenomena ini terjadi karena UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang tahan terhadap krisis ekonomi. Tahun 1998, UMKM terbukti tangguh dan dapat bertahan dibandingkan usaha besar dan korporasi. Ponorogo sendiri memiliki daya beli tinggi, UMKM mempunyai prospek besar untuk berkembang. UMKM menjadi salah satu dari elemen masyarakat yang merasakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 saat ini (<https://nusantaranews.co> diakses pada 30 November 2021).

Disamping itu, dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak pelaku UMKM yang menghadapi permasalahan dan akibatnya para pelaku UMKM sulit berkembang. Terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Ponorogo, yaitu terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh para pelaku UMKM yang merasa kesulitan sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pembukuan dan akuntansi sesuai standar yang berlaku. ( <https://nusantaranews.co> diakses pada 30 November 2021).

Kebutuhan laporan keuangan bagi pelaku UMKM tersebut dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan untuk memberikan jaminan kelangsungan hidup usahanya. Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia yang selanjutnya akan disebut DSAK IAI telah membuat dan meresmikan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya akan disebut SAK EMKM yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018.

Keberadaan IAI sebagai organisasi profesi akuntansi penyusunan SAK EMKM untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan penegakan usaha yang nyata dan memberikan jaminan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus ikut memajukan pertumbuhan usaha dari sektor UMKM di Indonesia. Menurut SAK EMKM (2016) tujuan penyusunan SAK EMKM adalah memudahkan pelaku UMKM yang ada di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Terjadinya ketidaksiapan para pelaku UMKM dalam mengimplementasikan standar keuangan yang berlaku sehingga dalam penerapannya banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Standar pencatatan keuangan yang diharapkan sebagai salah satu laporan usaha dianggap memberatkan para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Menurut Sulisti (2019) setiap usaha diharuskan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, penghitungan pajak, kinerja dan arus kas perusahaan. Kondisi yang menjadikan berbagai usaha yang dijalankan para pelaku UMKM sulit di pantau perjalanan dan perkembangannya.

Langkah pengoptimalan implementasi SAK EMKM dapat dilakukan dengan cara memahami dan siap atas penerbitan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pemahaman pada SAK EMKM merupakan kemampuan seseorang dalam menyusun laporan keuangan, kemudian dapat digunakan untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan), dan mengikhtisarkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana dan lebih mudah dalam penerapannya dibandingkan dengan SAK Umum berbasis IFRS dan SAK ETAP, tetapi dalam proses penyusunan pelaporan keuangan tetap memerlukan pemahaman yang cukup bagi para pelaku UMKM. Salmiah (2018) menyatakan bahwa kesadaran pelaku UMKM dalam menerapkan praktik keuangan masih rendah dan memiliki banyak kendala dan kelemahan yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai.

Suksesnya implementasi SAK EMKM secara keseluruhan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan dari pelaku UMKM. Menurut Tanmaela (2021) kesiapan merupakan keadaan pengelola UMKM yang membuatnya siap untuk memberikan jawaban dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan (knowledge) dapat dilihat dari wawasan pengelola UMKM tentang laporan keuangan dan SAK EMKM. Berdasarkan harapan dan tujuan dari penerbitan SAK EMKM oleh IAI, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pengelola UMKM dalam akuntansi, khususnya yang berdasar pada SAK

EMKM serta mengukur tingkat kesiapan pengelola UMKM untuk menunjang usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kesiapan dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sulisti (2019). Perbedaan penelitian terletak pada wilayah objek penelitian. Penelitian Sulisti (2019) mengambil objek penelitian di UMKM Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian di UMKM Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman dan Kesiapan dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Jenis Perdagangan dan Reparasi Di Kabupaten Ponorogo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo?

2. Apakah kesiapan berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pemahaman dan kesiapan berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan kesiapan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

**a. Bagi Universitas**

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mengembangkan ilmu tentang UMKM yang berkenaan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dan bisa dijadikan referensi di perpustakaan untuk menambah wawasan bagi pembaca.

**b. Bagi UMKM Kabupaten Ponorogo**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki UMKM dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan atau tolak ukur pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan Standar Akuntansi Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Kabupaten Ponorogo.

**c. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan serta menerapkan pada kegiatan di lapangan dalam penelitian.

Dan selanjutnya dapat membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang ada.

**d. Bagi Peneliti yang akan datang**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

